

Penerapan *e-Government* Melalui Website *Bandung Smart Map Plus (BSM⁺)* dalam Penataan Ruang di Kota Bandung Tahun 2022

Athaya Muhamad Zahran ^{1,*}; Samugyo Ibnu Redjo ² ; Ivan Darmawan ³

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia; athaya19002@mail.unpad.ac.id

*Correspondence : athaya19002@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penerapan *e-Government* oleh Pemerintah Kota Bandung melalui website BSM⁺ dalam membantu penataan ruang di Kota Bandung pada tahun 2022. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teori hasil riset Harvard JFK School of Government yang terdiri dari tiga elemen diantaranya *Support*, *Capacity*, dan *Value*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif, pengumpulan data menggunakan studi Pustaka, wawancara, dan observasi, serta penentuan informan menggunakan *purposive*. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Disciptabintar Kota Bandung, Diskominfo Kota Bandung, Bappelitbang Kota Bandung, DPRD Kota Bandung, serta lembaga peneliti *Agrarian Resource Center*. Adapun hasil penelitian ditemukan masih terdapat faktor penghambat serta masalah seperti integrasi yang tidak tercipta dalam internal pemerintah, kurangnya anggaran, menyebabkan tidak adanya *updating system data* peta udara, serta sosialisasi yang dilakukan masih belum secara massif, merata, dan kontinyu.

ABSTRACT

This research discusses the implementation of *e-Government* by the Government of Bandung City through the BSM⁺ website in helping spatial planning in the city of Bandung in 2022. This research using the theory of research results Harvard JFK School of Government which consists of three elements including *Support*, *Capacity*, and *Value*. This research uses descriptive qualitative methods, data collection using literature studies, interviews, and observations, as well as the determination of informants using *purposive*. The parties involved in this research are Disciptabintar Bandung, Diskominfo Bandung, Bappelitbang Bandung, DPRD Bandung, and Agrarian Resource Center Research Institute. The results of the study found that there are still inhibiting factors and problems such as integration that is not created in the internal of government, lack of budget, causing the absence of updating the air map data system, and socialization is still not done massively, evenly, and continuously.

Kata kunci

e-Government, *Informasi Data Geospasial*, BSM⁺

Keywords

e-Government, *Data Spatial Informations*, BSM⁺

Pendahuluan

Negara Indonesia yang masih bisa disebut sebagai negara berkembang menuju kearah negara maju saat ini terus melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas di segala aspek kehidupan bernegara. Melalui pemerintah, negara terus berusaha untuk meningkatkan kualitasnya. Adanya penyelenggaraan pemerintahan berbasis online yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu usaha untuk menghadapi tantangan yang ada. Perihal mengenai penerapan e-Government di Indonesia, berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh United Nation melalui e-Government Development Index (EDGI) Indonesia mengalami peningkatan peringkat pada tahun 2020 menjadi peringkat 88 yang dimana sebelumnya pada tahun 2018 Indonesia masih berada di peringkat 107.

Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang secara waktu terus berkembang secara pesat, tentunya melalui konsep e-Government bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memberikan suatu pelayanan di berbagai sektor serta kontribusi yang lebih baik terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam menjawab permasalahan maupun tuntutan-tuntutan yang ada di masyarakat, salah satunya mengenai permasalahan penataan ruang di Indonesia.

Permasalahan ataupun isu yang terjadi mengenai penataan ruang kota tidak terlepas dari adanya urgensi ketersediaan ruang bagi masyarakat itu sendiri. Jumlah penduduk semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan ruang akan meningkat juga, namun yang menjadi masalah adalah ketersediaan ruang yang tidak bisa bertambah. Jadi bisa dikatakan bahwa tata ruang kota ini menjadi salah satu komponen penting yang memang harus diperhatikan seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. pemerintah sendiri sudah memiliki landasan atau aturan yang mengatur tentang penataan ruang kota yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Setiap daerah yang ada di Indonesia pasti memiliki berbagai masalah penataan ruang kota yang berdasarkan ciri khas wilayahnya masing-masing.

Hadirnya konsep e-Government dalam penyelenggaraan pemerintah terus diusahakan oleh pemerintah. Salah satunya adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government yang menjelaskan bahwa adanya penyelenggaraan pemerintah berbasis online memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Selain dari adanya aturan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 terdapat aturan lain yang memberikan penjelasan lebih detail mengenai bagaimana pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan berbasis online (e-Government) harus dilaksanakan dengan semestinya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup aturan mengenai tata kelola, manajemen, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara, percepatan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE.

Sebagai salah satu contoh adanya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah Kota Bandung. Adanya pemanfaatan serta penerapan *e-Government* yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dipertegas melalui adanya Peraturan Walikota Bandung Nomor 60 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung terus berupaya memberikan suatu inovasi baru melalui adanya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan inovasi baru dari adanya pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi contohnya yaitu adalah adanya pembuatan website resmi oleh pemerintah Kota Bandung yang bernama Bandung Smart Map Plus (BSM+).

Melalui adanya penerapan konsep e-Government yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung memiliki tujuan untuk mengintegrasikan serta menyerap manfaat yang diberikan dari kemajuan teknologi yang ada untuk kepentingan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kota agar berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, penataan ruang kota khususnya Kota Bandung juga diarahkan kepada kota cerdas (Smart City) yang terus diupayakan oleh pemerintah Kota Bandung dengan dipertegas melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 1470 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (Master plan Bandung Smart City). Di dalam aturan tersebut terdapat beberapa indikator Smart City yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Bandung yang mencakup *Smart Government*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*.

Permasalahan - permasalahan mengenai penataan ruang di Kota Bandung saat ini masih menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Bandung. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 disebutkan beberapa permasalahan yang muncul dan belum mencapai titik penyelesaian dalam sektor penataan ruang di Kota Bandung mulai dari penyediaan prasarana jalan yang masih kurang dan tidak memenuhi standar, permasalahan banjir yang disebabkan karena jumlah ataupun fungsi dari drainase tidak optimal, serta kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) di beberapa wilayah, serta belum optimalnya perihal pengendalian pemanfaatan ruang yang disebabkan karena masih banyaknya pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan penggunaan lahan serta perizinannya. Salah satu bentuk contohnya yaitu persoalan penggusuran serta konflik lahan di Taman Sari, Dago Elos, serta permasalahan penggusuran lahan milik BUMN PT.Kai yang masih menjadi permasalahan hingga saat ini.

Jika merujuk pada data tabel 1 maka dapat dikatakan bahwa nyatanya Kota Bandung dalam hal peningkatan jumlah penduduk terus meningkat dari setiap tahun ke tahunnya. Dari adanya peningkatan jumlah penduduk di Kota Bandung dari tahun ke tahunnya menjadi suatu pekerjaan rumah yang memang harus dikerjakan oleh pemerintah Kota Bandung guna menghadapi dari resiko-resiko yang ada yang disebabkan karena jumlah penduduk cukup padat. Apabila

pemerintah tidak memperhatikannya maka hal tersebut juga akan berpengaruh, baik terhadap Kota Bandung maupun masyarakat Kota Bandung itu sendiri. Bertambahnya jumlah penduduk maka akan beriringan dengan sektor pembangunan yang didasari oleh kebutuhan masyarakat yang meningkat, mulai dari kepentingan pembangunan rumah, bangunan kegiatan jasa, industri, dan kepentingan masyarakat lainnya terhadap kebutuhan akan suatu ruang. Maka dari itu pemerintah sebagai aktor utama harus mampu memberikan jaminan serta kelayakan hidup yang berkeadilan bagi masyarakatnya.

Tabel 1. Data Sensus Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Penduduk
2015	2.481.469
2016	2.490.622
2017	2.497.938
2018	2.503.708
2019	2.507.888
2020	2.510.103

Sumber : BPS Kota Bandung (2020)

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan 3 (tiga) elemen sukses dalam hal penerapan e-Government seperti yang dijelaskan dalam buku Indrajit (2006) hasil riset dari JFK School of Government dapat dipertanyakan apakah dalam proses penerapan e-Government yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung sudah memenuhi serta melaksanakan beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam mencapai kesuksesan penerapan e-Government berdasarkan elemen support? Capacity? serta value?. Pada elemen support, berdasarkan hasil dari obeservasi awal yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Deni selaku Kepala Tim Website BSM+ pada tanggal 20 Februari 2023 ditemukan masih terdapat beberapa kekurangan dari adanya penyelenggaraan website Bandung Smart Map Plus (BSM+) dimana kekurangan tersebut diantaranya tidak diiringi bersamaan dengan aturan yang mengikat. Kota Bandung masih belum memiliki aturan yang mengikat perihal tata kelola data geospasial. Tidak adanya aturan yang mengikat perihal tata kelola data geospasial menyebabkan Bandung Smart Map Plus (BSM+) berjalan secara pincang. Hal tersebut terlihat jelas dari tidak adanya integrasi yang tercipta diantara tiap Operasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung. Karena tidak adanya regulasi yang mengikat sehingga perihal “siapa berbuat apa” masih belum jelas, selain itu juga setiap OPD yang seharusnya meng-upload data geospasial melalui Bandung Smart Map Plus (BSM+) masih belum terlaksana dengan baik. Kemudian perihal mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung terhadap masyarakat mengenai adanya website Bandung Smart Map Plus (BSM+) belum terlalu maksimal, hal tersebut disebabkan karena selama ini

hanya sebatas disebar melalui kanal Youtube saja. Selain daripada itu terlihat juga bahwa sosialisasi yang dilakukan masih belum tepat sasaran.

Kedua, elemen capacity adalah elemen yang melihat kepada unsur kemampuan atau keberdayaan (sumber daya) dari pemerintah dalam mewujudkan serta mencapai cita-cita atau tujuan dari adanya eGovernment. Adanya permasalahan mengenai kurangnya anggaran mempengaruhi juga terhadap permasalahan yang terjadi di sektor infrastruktur. Kurangnya anggaran sehingga menyebabkan tidak adanya update sistem data maupun peta yang dimiliki oleh Bandung Smart Map Plus (BSM+). Peta udara yang dimiliki oleh Bandung Smart Map Plus (BSM+) terakhir kali di update yaitu pada tahun 2016 sedangkan merujuk pada Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2017 tentang Cetak Biru Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Informasi Geospasial Tahun 2017-2021 menyebutkan bahwa update peta udara optimalnya adalah 5 tahun sekali karena kota mengalami perubahan secara dinamis seiring dengan berjalannya waktu.

Ketiga, elemen Value adalah seberapa jauh manfaat yang bisa diberikan dari adanya penerapan e-Government baik terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan (supply side) maupun masyarakat sebagai penerima layanan (demand side). Pada kenyataannya manfaat yang diberikan dari adanya penerapan e-Government melalui Bandung Smart Map Plus (BSM+) masih belum cukup optimal. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya aturan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung mengenai tata kelola data geospasial sehingga menyebabkan integritas tiap OPD belum tercipta dengan baik, adanya keterbatasan mengenai anggaran yang lebih difokuskan kepada penanganan covid-19 menyebabkan tidak adanya updating data system dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih belum bisa dikatakan cukup masif karena hanya sebatas melalui kanal Youtube milik pemerintah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugroho dan Purbokusumo (2020) mengeksplorasi kesiapan aktor utama dalam menerapkan e-government di Indonesia. Mereka mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kesiapan tersebut dan memberikan penilaian mendalam terhadap tingkat kesiapan para pelaku utama. Sementara itu, Damanik dan Purwaningsih (2018) fokus pada kesiapan pemerintah daerah menuju pengembangan konsep Smart Province, dengan studi kasus di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mereka menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan e-government serta dampaknya terhadap kemajuan daerah tersebut. Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Sudirman, Sari, dan Abdullah (2022) membahas penerapan e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Kendari. Mereka menyoroti kontribusi e-planning terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Berdasarkan uraian tersebut

maka perlunya dilakukan penelitian implementasi e-Government melalui platform website

Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi e-Government melalui platform website BSM+ oleh Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2022, dengan fokus pada penataan ruang. Kontribusinya bagi kajian e-Government adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan penataan ruang di tingkat lokal. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, penelitian ini memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong kemajuan e-Government di Kota Bandung dan potensialnya di daerah.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif secara deskriptif. Dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana peran pemerintah daerah dalam melaksanakan penerapan *e-Government* melalui website BSM+ dalam penataan ruang di Kota Bandung tahun 2022 serta menggambarkan hal atau faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pemerintah dalam penyelenggaraan *e-Government* maupun website BSM+. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam studi lapangan dapat dilakukan berbagai cara yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive* dalam menentukan informan yang akan digunakan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik dalam memvalidasi data dan informasi. Dalam melakukan triangulasi data terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh peneliti yakni Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, dan Triangulasi Waktu. Dalam melakukan analisis data, Sugiyono (2010) menyampaikan terdapat 3 tahapan diantaranya yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Garut.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan *e-Government* Melalui Website *Bandung Smart Map Plus (BSM+)* Dalam Penataan Ruang di Kota Bandung Tahun 2022

1. Elemen *Support*

Dalam elemen *support* merupakan salah satu hal terpenting yang memang harus dimiliki khususnya pemerintah dalam menjalankan program atau inovasi penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik. Adapun dukungan yang diperlukan yaitu berupa dukungan dari berbagai pejabat publik dan politik untuk menerapkan konsep e-Government yang dimiliki. Tanpa adanya dukungan di dalam pemerintah itu sendiri, maka akan sulit untuk memberikan suatu

pembangunan serta pengembangan konsep e-Government agar berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. peran serta dukungan dari pemerintah menjadi unsur terpenting guna mewujudkan berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-Government. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah maka akan mustahil pembangunan serta pengembangan e-Government dapat terwujud serta memberikan manfaat baru terhadap masyarakat itu sendiri baik persoalan mengenai keterbukaan data informasi maupun terhadap penataan ruang khususnya di Kota Bandung.

hadirnya konsep e-Government khususnya melalui website BSM+ dalam penataan ruang di Kota Bandung masuk dan selaras serta dijadikan sebagai kunci sukses utama untuk mencapai target dari Visi maupun Misi yang dimiliki Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung memiliki keinginan untuk menciptakan suatu kota yang maju dan dapat menunjang segala aktifitas maupun produktifitas kegiatan yang dimiliki masyarakat baik dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, maupun penunjang infrastruktur kota lainnya guna mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

jika merujuk pada tujuan dan manfaat yang ingin dicapai pada homebase website BSM+, bertujuan untuk menciptakan Bandung Kota Cerdas (smart city), Dimana untuk konsep smart city juga sudah didukung serta disebutkan dalam Peraturan Walikota Nomor 1470 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (Master Plan Bandung Smart City). Untuk dukungan adanya penerapan *e-Government* juga tidak luput untuk dipertegas melalui Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung. Adanya aturan serta kebijakan tersebut menjelaskan bahwasannya pemerintah Kota Bandung sudah berusaha dan mendukung perihal adanya penerapan *e-Government*.

Namun sangat disayangkan adanya penerapan konsep e-Government khususnya terhadap mengenai optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang di Kota Bandung sudah didukung dan dijadikan prioritas, tetap saja masih belum mencapai di titik dorong (support) yang optimal. hal tersebut disebabkan karena masih belum merata persoalan penggunaan website BSM+ di jajaran OPD pemerintah maupun masyarakat Kota Bandung, adanya tumpang tindih dalam sistem aplikasi yang mana banyak OPD lebih memilih menggunakan peta digital dari Google dibanding BSM+, belum terciptanya integrasi dari setiap OPD yang ada di jajaran pemerintah Kota Bandung.

Hadirnya konsep e-Government serta untuk mewujudkan tujuan serta cita-citanya memang bukan suatu hal yang mudah. Dengan hadirnya e-Government bukan hanya sebatas formalitas, tapi memang suatu hal yang harus dan perlu untuk diupayakan dalam hal mencapai tujuan dari konsep e-Government itu sendiri. upaya yang diperlukan berupa dukungan serta komitmen yang dimiliki dalam hal menjalankan aplikasi website BSM+ di setiap kalangan OPD yang ada di jajaran pemerintahan Kota Bandung.

Persoalan mengenai political will dalam hal penerapan konsep e-Government dalam pemerintahan tentu memegang peran penting juga untuk mencapai kesuksesan dalam penerapannya. Untuk membangun konsep e-Government diperlukan adanya dukungan political will untuk mengatur dalam hal pelaksanaan inovasi aplikasi/website secara lintas sektoral maupun dari tingkat atas hingga kebawah. Tujuan dari hadirnya dukungan political will itu sendiri adalah untuk memastikan serta menjamin suatu program dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditunjukkan atas dasar suatu aturan maupun instruksi ataupun kebijakan dari tingkat atas (pimpinan) hingga ke tingkat yang paling bawah.

Persoalan mengenai adanya political will terhadap website BSM+ milik pemerintah Kota Bandung pada dasarnya sudah diatur. Aturan yang dijadikan sebagai landasan dasar dari berdirinya website BSM+ yaitu aturan yang mengatur untuk menciptakan satu data (kebijakan satu data) khususnya mengenai informasi data geospasial. Mengenai informasi satu data geospasial sudah diatur dari tingkat level teratas hingga ke bawah (daerah) yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, kemudian turun ke tingkat bawahnya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Satu Data Jawa Barat, dan turun kembali hingga ke daerah (Kota Bandung) melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung. Persoalan dalam hal mewujudkan adanya kebijakan satu data terintegrasi tersebut masih terjadi permasalahan. Hal tersebut bisa dilihat melalui peran serta dari political will sebagai salah satu hal pendorong dalam mencapai kesuksesan penerapan khususnya website BSM+ masih belum terlihat. Terlihat bahwa memang masih banyak beberapa OPD yang tidak mengupload data maupun menggunakan website BSM+ perihal mengenai Informasi Geospasial (IG) Kota Bandung.

Dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan integrasi di dalam lingkungan pemerintah khususnya Kota Bandung tentu selain daripada aturan yang mengikat, peran dari pimpinan juga menjadi suatu hal yang penting untuk mengatur serta mengurus dan mengontrol dari jalannya suatu program. Persoalan mengenai political will yang terjadi dalam penyelenggaraan website BSM+ khususnya tahun 2022 masih belum berjalan. Hal tersebut dibuktikan melalui masih banyaknya OPD lain yang tidak mengupload data maupun menggunakan website BSM+ itu sendiri dan adanya ego sektoral yaitu lebih memilih menggunakan aplikasi selain BSM+ yaitu menggunakan google.

Dukungan terhadap infrastruktur serta superstruktur juga menjadi salah satu hal yang tidak bisa untuk dilewatkan dalam mengsucceskan penerapan eGovernment khususnya website BSM+. Pemanfaatan teknologi informasi tentu memerlukan kehadiran infrastruktur serta superstruktur pendukung guna mewujudkan tujuan dan keberhasilan dari adanya penerapan e-Government khususnya website BSM+ di Kota Bandung.

Persoalan mengenai dukungan infrastruktur yang dimiliki sudah mendukung untuk adanya pelaksanaan e-Government khususnya website BSM+ dalam membantu pemerintah menetapkan suatu kebijakan dalam penataan ruang di Kota Bandung. persoalan penyediaan mengenai jaringan, server, penyimpanan data dan hal lainnya oleh pihak Ciptabintang merasa sudah memadai, dimana semua hal yang berkaitan jaringan data, server, maupun penyimpanan sudah disediakan dan dilimpahkan kembali ke pihak Diskominfo.

Bentuk dukungan infrastruktur pemerintah Kota Bandung tahun 2022 bisa dilihat melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 khususnya Kota Bandung menunjukkan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Jawa Barat, menunjukkan bahwa Kota Bandung menduduki peringkat ke 2 (dua) dengan indeks 3,61 dengan predikat sangat baik setelah Pemerintah Kab. Sumedang yang menduduki peringkat ke 1 (satu) dengan indeks 3,84 dengan predikat sangat baik dari total 25 Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jika disimpulkan persoalan mengenai kesiapan infrastruktur teknologi yang dimiliki pemerintah Kota Bandung sendiri sudah mumpuni untuk menyelenggarakan SPBE khususnya di Kota Bandung

Selanjutnya dari segi superstruktur yang dimaksud adalah adanya dukungan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan e-Government sendiri. Adapun mengenai penerapan e-Government website BSM+ dalam penataan ruang di Kota Bandung Tahun 2022 yang ditunjuk sebagai Dinas Teknis penanggungjawab dalam pelaksanaannya yaitu Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung yang dikeluarkan melalui Perwal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung.

Aturan soal berdirinya website BSM+ secara mandiri masih belum ada, dan bahkan sejak diluncurkan tahun 2019 hingga 2022 website BSM+ mengalami "stuck". Pembuatan aturan mengenai turunan dari satu data Kota Bandung baru diusung tahun ini (2023) dimana hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menyatukan data agar tiap OPD yang memiliki keterkaitannya dengan IG (Informasi Geospasial) Kota Bandung dapat terkumpul melalui website BSM+ sebagai sarana penyimpanan data tersebut. Kemudian persoalan mengenai tujuan untuk menciptakan satu data Kota Bandung serta terintegrasinya data-data khususnya satu data mengenai informasi geospasial Kota Bandung melalui website BSM+ yang diharapkan belum tercapai.

Jika merujuk pada teori Indrajit (2006), sosialisasi disebut juga sebagai salah satu pendukung dalam elemen support untuk mencapai suatu kesuksesan penerapan e-Government dalam hal ini yaitu website BSM+. Lahirnya konsep e-Government memiliki tujuan dan fungsinya yaitu untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan dan juga membantu untuk meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat lebih baik, efektif, dan efisien. Persoalan mengenai sosialisasi dalam penerapan e-Government menjadi salah satu langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah setelah membuat suatu ide/gagasan/inovasi.

Berkaitan dengan sosialisasi website BSM+ sudah dilakukannya sosialisasi terhadap OPD melalui pertemuan-pertemuan rapat kerja maupun masyarakat dengan hanya sebatas melalui media sosial. Sosialisasi memang sudah dilakukan, namun pada kenyataannya belum mencapai target yang dituju, baik dari jajaran pemerintah (OPD) Kota Bandung maupun terlebih terhadap masyarakat.

Hal tersebut bisa dilihat melalui *claim* dari Disciptabintar bahwasannya mereka juga tidak mengetahui apakah memang masyarakat sudah menggunakan atau belum karena memang belum ada yang berinteraksi secara langsung maupun mengisi kolom saran dan masukan dalam website BSM+. hal serupa juga terlihat ketika bertanya kepada lembaga ARC yang berfokus pada isu agraria dan penataan ruang kota yang tidak mengetahui bahwa pemerintah Kota Bandung memiliki website resmi yang berisikan tentang data informasi geospasial.

Persoalan mengenai sosialisasi jika merujuk pada teori elemen sukses oleh Indrajit (2006) salah satunya melalui sosialisasi secara merata, dan kontinyu. Namun jika melihat pada kenyataan yang ada dilapangan bisa dikatakan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Disciptabintar belum mencapai sosialisasi yang merata dan kontinyu. Padahal bisa dikatakan bahwa sosialisasi merupakan salah satu hal pendorong yang sangat penting. Jika sosialisasi yang dilakukan tidak berhasil maka inovasi konsep e-Government yang dimiliki pemerintah (BSM+) hanya sebatas kepentingan untuk menjalankan aturan maupun kebijakan yang ada saja, tanpa memberikan manfaat yang ingin dituju dari hadirnya konsep e-Government itu sendiri

2. Elemen *Capacity*

Ketersediaan sumber daya finansial atau anggaran merupakan hal yang berkaitan dengan urusan keuangan. Perihal mengenai adanya ketersediaan sumber daya finansial/anggaran merupakan salah satu hal terpenting mengenai adanya penerapan konsep e-Government dalam hal ini salah satunya yaitu website BSM+. ketersediaan anggaran akan mempengaruhi pada peningkatan infrastruktur sehingga akan memberikan dampak terhadap suatu keberhasilan program penerapan e-Government. Adanya sumber daya finansial maka akan memberikan suatu modal untuk mendanai aktivitas baik untuk penyediaan sumber daya material maupun non-material. Penyelenggaraan website BSM+ dalam penataan ruang, sumber daya finansial/anggaran menjadi salah satu hal terpenting untuk mendanai persoalan pengembangan sistem aplikasi, infrastruktur teknologi website BSM+ yang bisa dikatakan memerlukan biaya yang tidak kecil.

anggaran yang diberikan kepada Diskominfo mengenai adanya penerapan e-Government (SPBE) di Kota Bandung cukup besar sekitar 160M, namun jika

mengenai website BSM+ hal tersebut memang menjadi bagian tanggungjawab dinas Teknis yaitu Disciptabintar untuk menentukan seberapa besar mengenai anggaran yang diperlukan dalam menjalankan website BSM+ itu sendiri.

Berdasarkan pernyataan Disciptabintar mengatakan bahwa anggaran yang dimiliki pada tahun 2022 berfokuskan kepada pengembangan data website BSM+ bukan mengenai pengembangan sistem. persoalan anggaran untuk website BSM+ dirasa masih kurang, yaitu hanya sebesar 2M yang terserap sekitar 70% ditambah dengan bentuk budaya soal pemenuhan atas dasar kebutuhan, kebutuhanlah yang harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

Dari pernyataan maupun penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum mengenai anggaran soal penyelenggaraan e-Government Kota Bandung mungkin sudah dirasa cukup mumpuni, hal itu bisa dilihat pada pembahasan sebelumnya terdapat data yang menunjukkan bahwa Kota Bandung menjadi Kota peringkat ke-2 dengan pelaksanaan e-Government sangat baik di Provinsi Jawa Barat. Namun jika kita melihat secara spesifik terhadap ketersediaan finansial/anggaran terhadap penyelenggaraan website BSM+ bisa dikatakan belum memenuhi kriteria dalam mendorong pengembangan website BSM+ dari sisi anggarannya. Tentu dari kurangnya anggaran dalam mendorong pengembangan website BSM+ akan berpengaruh terhadap sisi infrastruktur.

Selanjutnya Ketersediaan infrastruktur teknologi menjadi suatu hal yang wajib dan utama dalam mensukseskan konsep e-Government. Tanpa adanya kemajuan teknologi informasi mungkin saja konsep eGovernment itu sendiri tidak akan tercipta. Infrastruktur teknologi sendiri terdiri dari berbagai macam perangkat lunak maupun perangkat keras yang dapat digunakan dalam menjalankan maupun mengoperasikan suatu aplikasi/website tertentu. persoalan mengenai kesiapan dalam pengoperasian aplikasi/website tersebut maka dapat dilihat dari sisi kesiapan infrastruktur teknologinya. Apabila penyediaan infrasktruktur teknologinya sudah memadai maka hal tersebut akan menunjang produktifitas pengopreasian aplikasi tersebut, namun jika sebaliknya ketika infrastruktur teknologi tidak memadai dalam hal pengoperasian aplikasi/website tersebut, maka hal tersebut juga akan menjadi faktor penghambat dalam menjalankan maupun mengoperasikan suatu aplikasi/website tersebut.

Jika kita melihat secara lebih spesifik terhadap salah satu aplikasi/website, yaitu website BSM+ mengenai ketersediaan infrastruktur teknologi website BSM+ itu sendiri berbeda dengan infrastruktur teknologi informasi secara umum yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung. Persoalan mengenai kesiapan serta penyediaan infrastruktur teknologi pada website BSM+ dirasa masih mengalami beberapa kendala. Adapun kendala tersebut disebabkan karena belum siapnya infrastruktur teknologi dan informasi yang matang yang disebabkan oleh beberapa hal dan salah satunya permasalahan mengenai anggaran yang sebelumnya sudah dijelaskan. Tentu mengenai penyediaan infrastruktur teknologi informasi

memerlukan biaya yang cukup tinggi, ketika anggaran tersebut terbatas untuk menyelenggarakan konsep eGovernment salah satunya melalui website BSM+ maka akan memberikan dampak penghambat pada penyelenggaraan website BSM+ tersebut.

Adapun *claim* dari pihak Disciptabintar yang menyatakan bahwa mengenai penyediaan infrastruktur teknologi BSM+ dalam penyelenggaraannya masih terdapat suatu kendala. Adapun kendala tersebut yaitu peta udara yang tidak di update disebabkan karena kekurangan anggaran. Padahal jika melihat dari urgensi serta tujuan hadirnya website BSM+ adalah berfokus untuk me-mapping Kota Bandung. Tentunya foto peta udara menjadi salah satu hal yang krusial, namun memang persoalan mengenai kesiapan serta ketersediaan infrastruktur teknologi mengenai peta udara belum tercapai. Dari penilaian pihak Diskominfo mengatakan bahwa memang masih banyak OPD (Perangkat Daerah) masih menggunakan layanan peta dari google dibanding peta udara milik Disciptabintar karena alasan soal update peta yang lebih cepat dibanding website BSM+. Selain itu juga pihak Diskominfo memang menyayangkan bahwa pemanfaatan BSM+ belum mencapai di titik yang optimal dalam penyelenggaraannya.

Selain persoalan mengenai peta udara yang tidak di update sejak tahun 2016, Adapun permasalahan lainnya mengenai kesiapan serta penyediaan infrastruktur teknologi yaitu website BSM+ nyatanya sempat mengalami peretasan (hacking) oleh pihak yang tidak bertanggungjawab pada tahun 2020-2021. Dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keamanan terhadap akan suatu data yang ada di dalam website BSM+ belum terjamin. Padahal persoalan mengenai jaminan keamanan terhadap akan suatu data menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dan dijaga khususnya dalam penyelenggaraan website BSM+.

Dari penjelasan yang ada dapat disimpulkan bahwa persoalan mengenai kesiapan pemerintah dalam menyediakan teknologi infrastruktur penunjang penerapan konsep e-Government khususnya website BSM+ memang sudah bisa dikatakan memadai. Teknologi informasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Bandung meliputi ketersediaan jaringan, penyimpanan data, dan juga server yang terpusat. Namun dalam pelaksanaan secara teknis memang bisa dikatakan belum mencapai di titik optimal, dimana hal tersebut terlihat masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti peta yang tidak di update sejak tahun 2016 padahal jika merujuk pada aturan dari Badan Informasi Geospasial peta udara paling maksimal di update 5 tahun sekali karena suatu kota berubah secara cepat dan dinamis seiring berjalannya waktu.

Selain itu masih terdapat permasalahan mengenai keamanan data yang sempat diretas (hack) oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut mengindikasikan bahwa infrastruktur teknologi dalam hal menjaga keamanan data masih belum maksimal, walaupun sejak tahun 2022 hingga saat ini (2023) terus diupayakan untuk meningkatkan keamanan website BSM+ agar tidak terulang

kembali serta meminimalisir peretasan (hacking) oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kemudian, Pada setiap suatu pekerjaan, Sumber Daya Manusia menjadi salah satu hal terpenting dan dibutuhkan dalam melakukan suatu kegiatan maupun pekerjaan dalam pelaksanaannya. Suatu pekerjaan 172 maupun kegiatan jika tanpa adanya SDM maka hal tersebut akan menjadi suatu penghambat dalam melakukan suatu kegiatan dalam pekerjaan. Maka dari itu persoalan mengenai ketersediaan SDM menjadi salah satu hal terpenting dalam sebuah pekerjaan. Oleh karenanya SDM menjadi suatu hal krusial yang harus diperhatikan dari adanya penerapan konsep e-Government khususnya website BSM+ dalam penataan ruang di Kota Bandung.

Jika melihat kesiapan SDM yang dimiliki oleh Disciptabintar selaku pelaksana teknis sudah memiliki ahlinya dalam menunjang pelaksanaan website BSM+. Namun sangat disayangkan masih belum ada program ataupun kegiatan pelatihan yang dimiliki guna kepentingan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia yang sudah dimiliki. Bisa dikatakan bahwa program-program pelatihan kemudian ketersediaan jumlah serta kualitas SDM yang ada masih dirasa kurang. Padahal kesiapan mengenai SDM yang mumpuni dan berkompetensi menjadi salah satu hal paling penting dalam penerapan e-Government, ditambah dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat maka diperlukan juga penyesuaian SDM yang ada terhadap perubahan – perubahan teknologi yang cepat. Padahal program ataupun kegiatan pelatihan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas maupun kompetensi Sumber Daya Manusia serta bisa dijadikan sebagai evaluasi penilaian terhadap SDM yang sudah dimiliki.

3. Elemen Value

Melalui kehadiran website BSM+ bukan hanya dari sisi pemerintah saja, tapi dari sisi masyarakat Kota Bandung selaku pengguna dari hadirnya website BSM+ harus juga mendapatkan manfaat yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Bandung perihal inovasi yang dimiliki mengenai informasi data geospasial melalui website BSM+. Hal tersebut karena suatu inovasi dari hadirnya pengembangan teknologi informasi yang dikeluarkan pemerintah tentu juga harus bermanfaat bagi masyarakat, baik dari kebijakan penataan ruang kota yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung maupun persoalan mengenai manfaat dari hadirnya website BSM+ dalam mencari informasi data mengenai data geospasial Kota Bandung.

Persoalan mengenai adanya inovasi dari penerapan e-Government maka tidak akan mencapai keberhasilan jika tidak terdapat pihak yang diuntungkan dengan adanya penerapan e-Government itu sendiri. Maka dari itu suatu hal yang menentukan besar atau tidaknya manfaat yang dapat diberikan maupun diperoleh dengan hadirnya penerapan e-Government salah satunya yaitu pihak pemerintah.

Hadirnya website BSM+ yang berisikan mengenai data informasi geospasial Kota Bandung, tujuannya adalah dijadikan sebagai decision support bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan maupun aturan mengenai tata ruang di Kota Bandung dan juga sebagai komitmen pemerintah Kota Bandung untuk menciptakan Bandung Kota Cerdas (smart city). Persoalan mengenai penyelenggaraan website BSM+ nyatanya belum berdaya untuk mencapai target, nilai maupun manfaat yang akan dituju. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya masih terdapat beberapa macam faktor penghambat mulai dari persoalan mengenai belum adanya aturan yang mengikat tentang tata kelola data geospasial Kota Bandung yang merembet kepada tidak terciptanya integrasi yang ada di setiap OPD Kota Bandung, kemudian permasalahan mengenai anggaran yang belum memenuhi sehingga berlanjut menyebabkan updating system data yang belum juga di update. Jadi pada nyatanya bisa dikatakan pada elemen value terkhususnya 182 bagi pemerintah belum berada di titik yang optimal, hal tersebut karena disebabkan masih banyaknya beberapa faktor penghambat dalam penyelenggaraan website BSM+ itu sendiri.

Semakin cepat perkembangan teknologi informasi seiring berjalannya waktu menghasilkan suatu kondisi masyarakat yang semakin kritis sehingga pemerintah dituntut untuk bisa beradaptasi akan hal tersebut. Persoalan mengenai ketersediaan ruang, akomodasi transportasi, lingkungan hidup yang berkelanjutan dan sehat perlu diperhatikan. Maka dari itu pemerintah menerapkan konsep e-Government khususnya melalui website BSM+ sebagai arah strategis yang dapat ditempuh melalui adanya pemanfaatan teknologi informasi yang berisikan mengenai data informasi geospasial, dimana hal tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat serta memberikan transparansi mengenai keterbukaan informasi data geospasial di Kota Bandung.

Seperti pada pembahasan sebelumnya masih belum ada masyarakat yang berinteraksi secara langsung dan pihak Disciptabintar tidak mengetahui apakah masyarakat sendiri menggunakan website BSM+ atau tidak sama sekali. persoalan mengenai keberadaan website BSM+ milik pemerintah Kota Bandung dari segi nilai dan manfaat belum memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Suatu manfaat tidak akan tercapai apabila persoalan mengenai penggunaan website BSM+ di kalangan masyarakat sendiri belum terdeteksi dan tidak ada kepastian apakah masyarakat sendiri menggunakan website BSM+ atau tidak. Padahal dari kehadiran website BSM+ ini memiliki berbagai macam potensi yang dapat digunakan baik oleh pemerintah Kota Bandung maupun sebagai bentuk pelayanan mengenai informasi data geospasial terhadap masyarakat.

Kesimpulan

Jika dilihat dari elemen support, pemerintah Kota Bandung sudah menyepakati bahwasannya konsep penerapan eGovernment merupakan salah satu

kunci sukses dalam mencapai tujuan pemerintahannya. Hal tersebut terlihat mulai dari Visi Misi pemerintah Kota Bandung, kemudian juga aturan yang mengikat persoalan mengenai hadirnya konsep e-Government dan jika merujuk pada RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 hadirnya penerapan e-Government khususnya website BSM+ masuk kedalam isu strategis dalam mewujudkan Bandung Kota Cerdas (smart city) dan juga pengembangan infrastruktur kota yang berlandaskan pada lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan kesuksesan dalam penerapan e-Government harus adanya dukungan dari political will untuk mengatur dalam pelaksanaannya secara lintas sektoral maupun dari tingkat atas hingga kebawah. Sayangnya dalam penerapan website BSM+ pada tahun 2022 masih belum terlihat. Hal tersebut dapat dilihat masih banyak OPD lain yang tidak mengupload data maupun menggunakan website BSM+ dan juga masih adanya ego sektoral yaitu lebih memilih menggunakan aplikasi lain selain BSM+ yaitu google.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung dirasa belum cukup untuk memenuhi poin sosialisasi yang merata dan kontinyu. Hal tersebut dapat terlihat dari penemuan peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa dari Pihak Disciptabintar yang mengaku sosialisasi yang dilakukan tidak tepat sasaran baik terhadap internal pemerintah Kota Bandung maupun masyarakat. Selain itu Dinas Teknis (Disciptabintar) juga tidak mengetahui apakah dari sisi masyarakat betul-betul menggunakan atau tidak website BSM+ karena memang tidak ada interaksi secara langsung mengenai penyelenggaraan website BSM+. Bahkan dalam website BSM+ terdapat fitur komentar untuk memberikan masukan dan saran, tapi fitur komentar tersebut belum ada pengguna yang mengisinya.

Melalui Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung dalam penerapan website BSM+ pada sisi anggaran yang digunakan dititikberatkan kepada sumber APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah juga. Namun persoalan mengenai kemampuan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung dirasa belum cukup untuk memenuhi penyelenggaraan website BSM+. persoalan mengenai anggaran yang tidak mencukupi disebabkan karena adanya refofusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung untuk menangani penanganan covid-19 sehingga penyelenggaraan website BSM+ menjadi salah satu korban dari adanya pemangkasan terhadap anggaran.

Kemudian kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur teknologi dalam penerapan website BSM+ masih juga belum dikatakan mencapai titik yang optimal. Padahal secara ketersediaan infrastruktur teknologi secara umum untuk menyelenggarakan SPBE di Kota Bandung sudah memadai, tapi jika hanya melihat pada website BSM+ persoalan mengenai kemampuan pemerintah terhadap ketersediaan infrastruktur teknologi belum tercapai. Hal tersebut bisa dilihat belum adanya updating foto peta udara yang seharusnya di-update 5 tahun

sekali, selanjutnya persoalan mengenai peretasan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab, kemudian persoalan mengenai kemudahan pengaplikasian bagi pengguna juga masih belum terdapat fitur bertanya secara real-time bersama admin website BSM+.

Terakhir ditinjau dari elemen *value*, dari hadirnya website BSM+ belum terpenuhi, terlihat dari penerapan website BSM+ yang belum optimal. penerapan website BSM+ yang belum optimal ditandai dengan masih belum adanya pengguna dari sisi masyarakat. Selain itu juga dari sisi pemerintah pada elemen *value* belum tercapai juga, hal tersebut bisa dilihat dari permasalahan – permasalahan yang ada dan sudah disinggung baik pada elemen *support* dan *capacity*, dimana hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap elemen *value*. Dari permasalahan tersebut baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat terlihat bahwa kebermanfaatan yang ingin dicapai dari hadirnya website BSM+ bisa dikatakan belum tercapai.

Referensi

- Berg, B. L. & Lune, H. (2012). *Qualitative Research Methods For Social Sciences*. Boston and New York: Pearson Education
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung (BPS) “Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Bandung, 2014-2018. <https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2020/07/06/687/jumlah-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-di-kota-bandung-2014-2018.html>
- Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2018). Kesiapan E-Government Pemerintah Daerah Menuju Pengembangan Smart Province (Studi pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(2), 185-196.
- Dona & Laelabilkis, (2019). Urgensi Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) Sebagai Instrumen Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Magelang. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah (Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang)*.
- Indrajit, R.E. (2005). *E-Government in Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta. Andi.
- Indrajit, R.E. (2006). *ELECTRONIC GOVERNMENT: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: C.V. ANDI OFFSET.
- Moleong, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia (E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in Indonesia). *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 22(1), 1-17.

- Ndraha, T. (2002). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rustanto, B. (2015). *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Rosidin, U. (2019). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Simanjuntak & Elvis. (2012). *Metode Penelitian*. Medan: Percetakan SADIA.
- Sitoruus, S. R. P. (2019). *Penataan Ruang*. Bogor: IPB Press.
- Sutaryono, dkk. (2020). *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah "Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan"*.
- Sudirman, F. A., Sari, E. I., & Abdullah, A. (2022). Penerapan E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Kendari: Kontribusi untuk SDGs. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 174.
- Sutaryono, Westi Utami. (2019). *Modul Analisis Tata Ruang*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional